

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul wahab, Solichin. 2008, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara : Jakarta
- Amirullah, Pengantar Manajemen. Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2011)
- Dunn. William N ,2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC. Congressional Quarterly Press
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1997. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses, Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Drs. Soewarno. 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Handayani, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.
- Hansen dan Mowen. 2001. Manajemen Biaya, Salemba Empat, Jakarta. Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handayani, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Haji Masagung, 2010)
- Ibrahim, Indrawijaya, Adam. 2010. Teori, Perilaku Budaya Organisasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pembinaan.
- Lubis, Hari dan Huseini Martani. 1987. Teori Organisasi (suatu Pendekatan Makro). Bandung: Ghalia Indonesia

- Martini dan Lubis, 1987. Teori Organisasi. Bandung ; Ghalia Indonesia
- Melati, Swi Putri. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Volume 9. Nomor 1. Januari-Maret 2015
- Moleong, Lexy J.2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009, Public Policy, ElexMediaKomputindo: Jakarta
- Pasalbessy, John Dirk. 2010. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. Jurnal Sasi Vol. 16. No. 3 Juli-September 2010
- Steers, Richard,M, 1980. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta.
- Subarsono. 2011, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiono. 2010, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta: Bandung
- Suyanto, Bagong. 2003. Masalah Sosial Anak. Kencana: Jakarta
- Stoner.Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2010)
- Unicef. 2012. Ringkasan Kajian Perlindungan Anak edisi oktober. Unicef Indonesia: Jakarta

Dokumen

- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 1361/050/kep/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar Tahun 2014-2019
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2014 – 2019

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor.11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
Kekerasan dalam Rumah tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1
Wawancara dengan Pejabat DP3A dan Anggota *Shelter* Warga



(Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Hadijah Djalante, S.IP dan Koordinator P2TP2A Kota Makassar, Naris, S. IP)



(Foto bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Hadijah Djalante, S.IP dan Anggota *Shelter* Warga Tamamaung, Nurhana)

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Narasumber	Pertanyaan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kebijakan dinas P3A terkait perlindungan anak? 2. Sejauh mana ketersediaan sumber daya dalam merealisasikan kebijakan tersebut? 3. Apakah masih ada kebutuhan dinas P3A agar kebijakan ini berjalan efektif? 4. Apakah sumber daya yang ada sudah cukup dalam memberikan pelayanan prima? 5. Dalam pencegahan kekerasan anak, bagaimana model sosialisasi yang dilakukan dinas P3A? 6. Dalam hal pendampingan korban, bagaimana model yang dilakukan dinas P3A? 7. Salah satu program dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, bisa dijelaskan bagaimana programnya? 8. Apa saja layanan yang disediakan <i>Shelter</i> warga? 9. Bagaimana capaian dari program <i>Shelter</i> warga? 10. Apa saja indikator keberhasilan program <i>Shelter</i> warga? 11. Bagaimana dukungan anggaran terhadap program <i>Shelter</i> warga? 12. Bagaimana model pengawasan dinas P3A terhadap keaktifan <i>Shelter</i> warga? 13. Adakah program khusus terkait pencegahan kekerasan terhadap anak di kota Makassar?
2	DPRD Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kebijakan Pemkot Makassar terkait perlindungan anak? 2. Sejauh mana ketersediaan sumber daya dalam merealisasikan kebijakan tersebut? 3. Salah satu program dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, Bagaimana capaian dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak? 4. Apa saja indikator keberhasilan program <i>Shelter</i> warga? 5. Bagaimana dukungan anggaran terhadap program <i>Shelter</i> warga? 6. Bagaimana model pengawasan dinas P3A terhadap keaktifan <i>Shelter</i> warga?
3	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan terkait pencegahan kekerasan anak dinas P3A kota Makassar? 2. Apa saja program terkait perlindungan anak di dinas P3A? 3. Salah satu program dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, bisa dijelaskan bagaimana model program tersebut? 4. Bagaimana ketersediaan sumber daya (SDM, fasilitas dan anggaran) dalam menjalankan

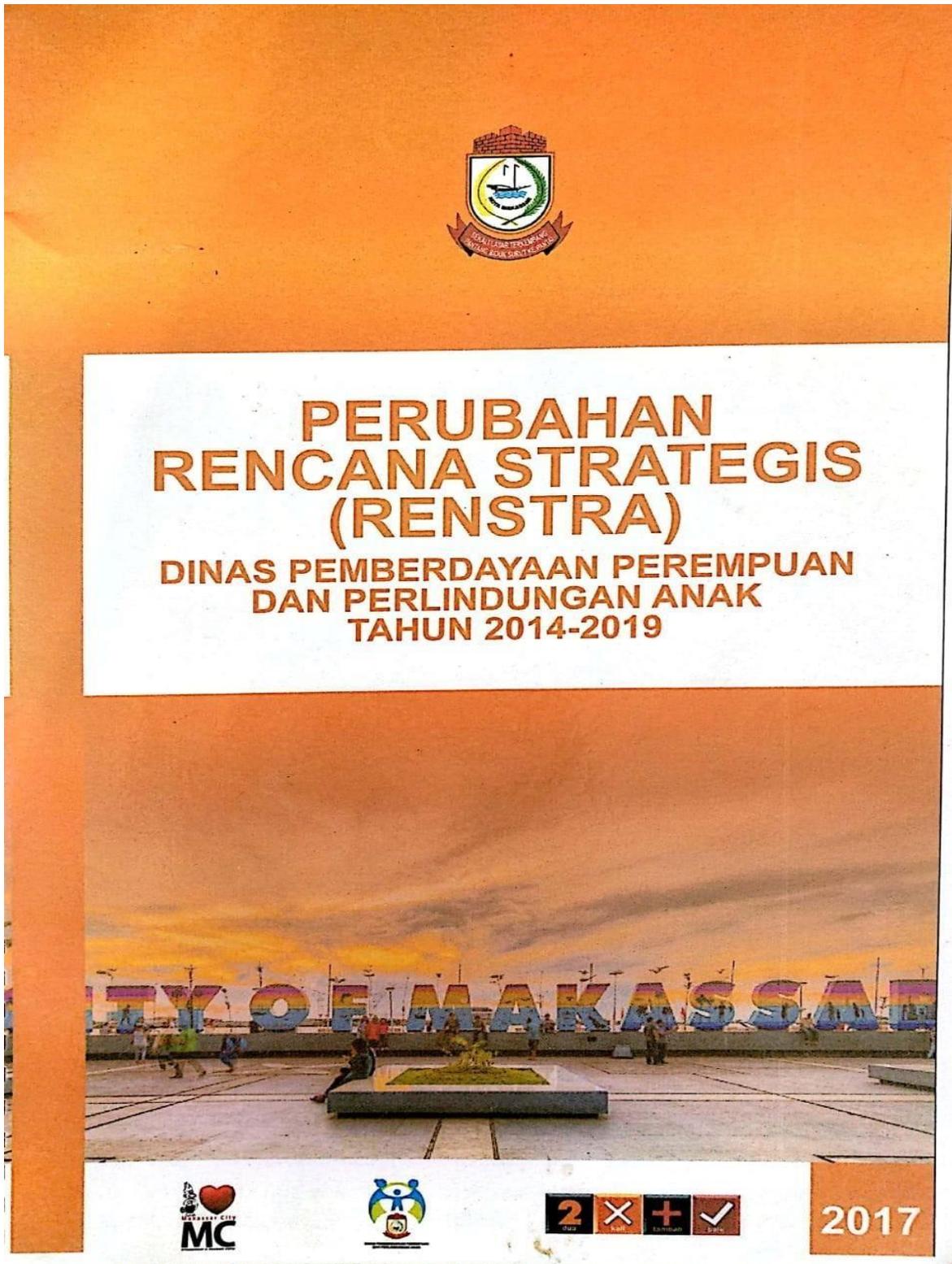
1	2	3
	Perlindungan Anak	<p><i>Shelter</i> warga ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana mekanisme pembentukan <i>Shelter</i> warga? 6. Berapa jumlah <i>Shelter</i> warga yang ada di kota Makassar? 7. Apa saja jenis layanan <i>Shelter</i> warga? 8. Bagaimana model pendampingan masyarakat untuk <i>Shelter</i> warga? 9. Bagaimana pelaksanaan program <i>Shelter</i> warga? 10. Bagaimana SOP <i>Shelter</i> warga? 11. Bagaimana model sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan <i>Shelter</i> warga ditengah masyarakat? 12. Apa saja kendala yang dihadapi program <i>Shelter</i> warga? 13. Apakah ada program khusus pencegahan kekerasan anak yang dilakukan Dinas P3A dan <i>Shelter</i> warga? 14. Bagaimana model evaluasi terhadap keaktifan <i>Shelter</i> warga? 15. Apa saja capaian yang diraih program <i>Shelter</i> warga dalam pencegahan kekerasan anak? 16. Sejauh mana capaian Dinas P3A dalam menekan angka kekerasan anak di kota Makassar?
4	Kasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajak program terkait perlindungan anak di dinas P3A? 2. Salah satu program dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, bisa dijelaskan bagaimana model program tersebut? 3. Bagaimana ketersediaan sumber daya (SDM, fasilitas dan anggaran) dalam penjalankan <i>Shelter</i> warga ini? 4. Bagaimana mekanisme pembentukan <i>Shelter</i> warga? 5. Berapa anggaran operasional yang di siapkan dinas P3A setiap <i>Shelter</i> warga? 6. Berapa jumlah <i>Shelter</i> warga yang ada di kota Makassar? 7. Apa saja jenis layanan <i>Shelter</i> warga? 8. Bagaimana model pendampingan masyarakat untuk <i>Shelter</i> warga? 9. Bagaimana SOP <i>Shelter</i> warga? 10. Bagaimana model sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan <i>Shelter</i> warga ditengah masyarakat? 11. Apa saja kendala yang dihadapi program <i>Shelter</i> warga? 12. Apakah ada program khusus pencegahan kekerasan anak yang dilakukan Dinas P3A dan

1	2	3
		<p><i>Shelter</i> warga?</p> <p>13. Bagaimana model evaluasi terhadap keaktifan <i>Shelter</i> warga?</p> <p>14. Apa saja capaian yang diraih program <i>Shelter</i> warga dalam pencegahan kekerasan anak?</p> <p>15. Sejauh mana capaian Dinas P3A dalam menekan angka kekerasan anak di kota Makassar?</p>
5	P2TP2A Kota Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajak program terkait perlindungan anak di dinas P3A? 2. Apa saja program yang ada pada P2TP2A? 3. Bagaimana mekanisme penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan P2TP2A? 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas dan anggaran yang dimiliki P2TP2A? 5. Bagaimana koordinasi P2TP2A dengan lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak? 6. Salah satu program dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, bisa dijelaskan bagaimana model program tersebut? 7. Bagaimana koordinasi antara P2TP2A dan <i>Shelter</i> warga? 8. Apa saja jenis layanan <i>Shelter</i> warga? 9. Bagaimana model pendampingan masyarakat untuk <i>Shelter</i> warga? 10. Bagaimana model sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan <i>Shelter</i> warga ditengah masyarakat? 11. Apakah ada program khusus pencegahan kekerasan anak yang dilakukan Dinas P3A dan <i>Shelter</i> warga? 12. Apa saja capaian yang diraih program <i>Shelter</i> warga dalam pencegahan kekerasan anak? 13. Sejauh mana capaian Dinas P3A dalam menekan angka kekerasan anak di kota Makassar? 14. Bagaimana model kolaborasi lintas lembaga yang dilakukan P2TP2A dalam pencegahan kekerasan terhadap anak?
6	Pengelola <i>Shelter</i> warga aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan anda ditunjuk menjadi penanggung jawab <i>Shelter</i> warga? 2. Bagaimana proses pembentukan <i>Shelter</i> warga? 3. Apa saja program yang ada pada <i>Shelter</i> warga? 4. Bagaimana cara anda mensosialisasikan <i>Shelter</i> warga ke warga sekitar? 5. Apa saja kebutuhan yang harus di penuhi agar kinerja <i>Shelter</i> warg bisa optimal? 6. Bagaimana model pendampingan yang dilakukan oleh dinas P3A? 7. Apakah ada bantuan anggaran dari dinas P3A?

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Selain dari pemerintah, apakah anda pernah mendapatkan anggaran dari pihak lain misalnya CSR? 9. Bagaimana dukungan pemerintah setempat terhadap keberadaan <i>Shelter</i> warga? 10. Bagaimana Standar operasional prosedur yang dimiliki <i>Shelter</i> warga? 11. Bagaimana mekanisme pelayanan terhadap masyarakat yang mengadu ke <i>Shelter</i> warga? 12. Bagaimana model pendampingan yang anda lakukan untuk masyarakat yang melapor ke <i>Shelter</i> warga? 13. Sudah berapa kasus yang anda tangani dan kasus seperti apa? 14. Bagaimana model program kekerasan terhadap anak yang anda lakukan di <i>Shelter</i> warga? 15. Apakah anda rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan anak? 16. Bagaimana model evaluasi dari dinas P3A terhadap <i>Shelter</i> warga? 17. Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan <i>Shelter</i> warga? Apa harapan anda untuk penyelenggaraan <i>Shelter</i> warga kedepan?
7	Pengelola <i>Shelter</i> warga tidak aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan anda ditunjuk menjadi penanggung jawab <i>Shelter</i> warga? 2. Bagaimana proses pembentukan <i>Shelter</i> warga? 3. Apa saja program yang ada pada <i>Shelter</i> warga? 4. Apa saja kebutuhan yang harus di penuhi agar kinerja <i>Shelter</i> warg bisa optimal? 5. Bagaimana model pendampingan yang dilakukan oleh dinas P3A? 6. Apakah ada bantuan anggaran dari dinas P3A? 7. Bagaimana dukungan pemerintah setempat terhadap keberadaan <i>Shelter</i> warga? 8. Bagaimana Standar operasional prosedur yang dimiliki <i>Shelter</i> warga? 9. Sudah berapa kasus yang anda tangani dan kasus seperti apa? 10. Bagaimana model program kekerasan terhadap anak yang anda lakukan di <i>Shelter</i> warga? 11. Bagaimana model evaluasi dari dinas P3A terhadap <i>Shelter</i> warga? 12. Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan <i>Shelter</i> warga? 13. Apa harapan anda untuk penyelenggaraan <i>Shelter</i> warga kedepan?
8	Orang tua / korban kekerasan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernahkah bapak/ibu mendengar istilah <i>Shelter</i> warga? 2. Darimana bapak/ibu memperoleh informasi terkait <i>Shelter</i> warga? 3. Apakah ibu pernah melakukan pengaduan ke <i>Shelter</i> warga? 4. Bagaimana mekanismenya untuk melapor?

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana jenis pelayanan yang diberikan? 6. Selain <i>Shelter</i> warga, apakah anda pernah dilayani tim P2TPA atau dinas P3A? 7. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak? 8. Bagaimana pendapat anda terkait pelayanan yang diberikan <i>Shelter</i> warga? 9. Apakah setelah anda melapor, pihak <i>Shelter</i> warga melakukan pendampingan kepada anda? 10. Sejauh mana kualitas penanggung jawab <i>Shelter</i> warga? 11. Bagaimana menurut anda ketersediaan fasilitas di <i>Shelter</i> warga? 12. Apakah ada pungutan yang diminta saat dilayani <i>Shelter</i> warga? 13. Apakah anda puas terhadap pelayanan yang diberikan pihak <i>Shelter</i> warga? Apa yang perlu dibenahi dalam pelayanan <i>Shelter</i> warga?
9	Lembaga Pemerhati Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan anda terkait kebijakan perlindungan anak dikota Makassar? 2. Bagaimana sejauh ini kemampuan dinas P3A dalam menjalankan program perlindungan anak? 3. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa dinas P3A memperoleh banyak penghargaan, bagaimana tanggapan anda? 4. Kehadiran P2TP2A menjadi forum bagi lintas instansi dan elemen masyarakat, bagaimana tanggapan anda terhadap efektifitas forum ini? 5. Salah satu program dari dinas P3A adalah <i>Shelter</i> warga, bagaimana menurut anda terkait program ini? 6. Bagaimana menurut anda sosialisasi yang dilakukan <i>Shelter</i> warga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak? 7. Bagaimana menurut anda pendampingan yang dilakukan <i>Shelter</i> warga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak? 8. <i>Shelter</i> warga ini kan model pelibatan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak, apakah program ini sudah efektif? 9. Apa yang perlu dibenahi dalam program <i>Shelter</i> warga? 10. Salah satu kendala dari <i>Shelter</i> warga adalah anggaran operasional, apakah memungkinkan mendapatkan anggaran dari pihak swasta? 11. Apa yang perlu dibenahi dari program pencegahan kekerasan anak dikota Makassar? 12. Seperti apa kebijakan dan program yang pencegahan kekerasan anak yang dibutuhkan kedepannya?

Lampiran 3
Perubahan rencana Strategis (Renstra) DP3A Tahun 2014-2019



BAB V

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dikelompokkan menjadi

- (1) Program Umum yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, dan
- (2) Program Khusus yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan berdasarkan kelompok urusan (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

5.1. Program Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dimaksud meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan aparatur. Kegiatan pokok yang dilakukan, antara lain :

1. Penyediaan jasa suratmenyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm Kantor/teknis lainnya
5. Penyediaan bahanbacaan.
6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran
7. Rapat – rapat koordinasi keluar daerah.
8. Sosialisasi kinerjadan pelayanan publik.
9. Penyediaan jasa jaminan sosial ketegakerjaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Pengadaan Alat Kantor
2. Pengadaan Alat Rumah Tangga
3. Pengadaan Komputer
4. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat
5. Pengadaan Alat Studio
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja
11. Penyediaan Jasa perizinan dan sertifikasi
12. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam pelaksanaan kerjanya. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan sumber daya aparatur melalui kegiatan pelatihan – pelatihan, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan formal.
2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam penyampaian laporan pencapaian kinerja dan administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan RKASKPD.
2. Penyusunan DPASKPD.
3. Penyusunan RENJA.
4. Penyusunan LAKIPSKPD
5. Penyusunan TAPKIN SKPD
6. Penyusunan RENSTRA
7. Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan akhir tahun dan perhitungan penyusunan asset.
8. Pengelolaan Keuangan SKPD
9. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
10. Evaluasi Renja SKPD
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
12. Fasilitasi Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPA

Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan 2019 program yang disusun berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.2. Program Khusus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dimaksud meliputi :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan peran dan kualitas bagi Ibu Rumah Tangga.
2. Pembinaan kelompok perempuan dalam pembinaan kelurahan terpadu.
3. Pembinaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
4. Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)
5. Pelatihan keterampilan kelompok pemberdayaan perempuan.
6. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
7. Pelatihan Tata Rias Wajah Bagi Perempuan
8. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga bagi PKRT
9. Peningkatan SDM Perempuan Pesisir dan Pulau
10. Lokakarya Manajemen Kelompok Majelis Taklim
11. Operasional Pokjanal Posyandu

2. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG).
2. Koordinasi dan pelatihan penganggaran responsif gender.
3. Koordinasi penguatan kelembagaan PUG.
4. Fasilitasi *Coaching Corner* Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak dalam mewujudkan anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria dan Berakhlak Mulia serta kepastian hukum bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
2. Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking.
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
4. Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO)
5. Penyediaan dan pengelolaan *Shelter* (rumah aman)
6. Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A
7. Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan
8. Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV/AIDS
9. Bina Keluarga Lansia
10. Pelatihan Pengelolaan *Shelter* Warga
11. Sosialisasi *Shelter* Warga
12. Fasilitasi *Shelter* Warga
13. Perumusandan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
14. Workshop Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Dini

4. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Anak

Tujuan program ini untuk kelembagaan dan pengarusutamaan anak. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Penguatan dan pengembangan forum anak
2. Festival Forum Anak Makassar
3. Sosialisasi Kota Layak anak
4. Pembinaan Kelembagaan Anak
5. Pembinaan karakter dan kepribadian anak
6. Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak
7. Pembinaan anak-anak prasejahtera
8. Pemanfaatan taman tematik yang layak untuk anak
9. Fasilitasi kelurahan Layak Anak
10. Fasilitasi Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
11. Layanan Integritas Anak
12. Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak
13. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Penyandang Disabilitas bagi Anak Korban Kekerasan
14. Pelatihan layanan komprehensif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah
15. Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak
16. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Kota Layak Anak

5. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Tujuan program ini untuk memperkuat peran dan jaringan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan ditingkat Kabupaten/Kota, sehingga Sumber Daya Perempuan tak dianggap sebagai objek akan tetapi sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Pembinaan organisasi perempuan.
2. Pembinaan TP-PKK Kota Makassar
3. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

4. Penyuluhan pemahaman tentang makassar' tidak rantas bagi Ibu Rumah Tangga.
5. Workshop Lorong Berspektif Gender
6. Workshop Perempuan Penggerak Lorong
7. Workshop Pembuatan Souvenir Perkawinan Khas Kota Makassar
8. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan

6. Program Sistem Data Gender dan Anak.

Tujuan program ini untuk penguatan sistem data gender dan anak.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak
2. Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Sistem Informasi & Manajemen (SIM) PPA
4. Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak
5. Penataan dan Pendataan Arsip Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Pembuatan Panduan Pelayanan Publik Responsive Gender/Pro Anak
7. Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu
8. Pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
9. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Anak
10. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Perempuan
11. Penguatan Forum Data
12. Sosialisasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak
13. Evaluasi Kota Layak Anak
14. Evaluasi Gugus Tugas Trafficking
15. Indeks Kepuasan Publik terhadap Pemberdayaan perempuan dan Anak

Indikator Kinerja

Selanjutnya program sebagaimana tersebut di atas dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan- kegiatan, yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (Ex-ante), tahap pelaksanaan (On-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (Ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan, terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai demi suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (Benefits) sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat padatablel.

Kelompok Sasaran

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun ke depan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan. Indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberapa indikator output melalui beberapa kegiatan di setiap program. Akumulasi capaian output, diharapkan dapat menghasilkan capaian outcome yang telah ditetapkan di setiap program. Secara rinci, uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut yang dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Makassar 2017 – 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas/Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sistem administrasi perkantoran yg tertib & lancar	Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.933.166	100%	2.060.000	100%	2.318.400	100%	6.311.566
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Pengiriman surat2	3 Orang	3 Orang	10.800	3 Orang	15.000	3 Orang	20.000	3 Orang	45.800
			Penyediaan Jasa Komunikasi	Tersedianya jasa komunikasi dalam melaksanakan Tupoksi	12 Bulan	12 Bulan	54.000	12 Bulan	55.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	179.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga & bahan bahan kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	16.000	2 Orang	16.000	2 Orang	21.500	2 Orang	53.500

			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm Kantor/teknis lainnya	Tenaga Kerja Non PNS	18 Orang	18 Orang	118.800	20 Orang	204.000	22 Orang	224.400	22 Orang	547.200
--	--	--	--	----------------------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

			Penyediaan Bahan Bacaan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	7 Jenis	7 Jenis	200.964	7 Jenis	205.000	7 Jenis	225.000	7 Jenis	630.964
--	--	--	-------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya ATK, Cetakan & Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan	420.415	12 Bulan	425.000	12 Bulan	500.000	12 Bulan	1.345.415
			Rapat-rapat Koordinasi keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas koordinasi keluar dan kedalam daerah	94 Orang	94 Orang	582.000	100 Orang	600.000	100 Orang	650.000	100 Orang	1.832.000
			Sosialisasi kinerja pelayanan publik	Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik	1 Tahun	1 Tahun	526.514	1 Tahun	535.000	1 Tahun	600.000	1 Tahun	1.661.514
			Penyediaan jasa jaminan sosial ketegakerjaan	Jumlah Tenaga Non PNS yang mendapatkan Premi Asuransi Ketegakerjaan	18 Orang	18 Orang	3.673	20 Orang	5.000	22 Orang	7.500	22 Orang	16.173
Meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	953.562	100%	894.500	100%	1.182.000	100%	3.030.062
			Pengadaan Alat Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	4 Unit	4 Unit	17.611	4 Unit	20.000	4 Unit	25.000	12 Unit	62.611
			Pengadaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	6 Unit	6 Unit	62.500	6 Unit	65.000	6 Unit	70.000	18 Unit	197.500

			Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer, Mesin ketik elektrik, Note Book dan Printer	11 Unit	11 Unit	192.000	11 Unit	200.000	11 Unit	250.000	33 Unit	642.000
--	--	--	--------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja/ Rapat	25 Buah	25 Bh	87.000	25 Bh	90.000	25 Bh	125.000	75 Bh	302.000
			Pengadaan Alat Studio	Tersedianya Peralatan Studio	1 Unit	1 Unit	23.000	1 Unit	25.000	1 Unit	50.000	3 Unit	98.000
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	1 Unit	52.807	1 Unit	52.500	1 Unit	70.000	1 Unit	175.307
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Keg.	1 Keg.	315.942	1 Keg.	325.000	1 Keg.	350.000	1 Keg.	990.942
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor	1 Unit	1 Unit	1.000	1 Unit	5.000	1 Unit	7.000	1 Unit	13.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer	39 Unit	39 Unit	40.002	39 Unit	40.000	39 Unit	50.000	39 Unit	130.002
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60%	60%	50.000	60%	60.000	65%	70.000	65%	180.000
			Penyediaan Jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah Surat Kepemilikan	7 Unit	7 Unit	11.700	7 Unit	12.000	7 Unit	15.000	7 Unit	38.700

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN

				Kendaraan									
			Pengadaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM)	Tersedianya Aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM)	2 Paket	2 Paket	100.000			2 Paket	100.000	4 Paket	200.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan disiplin aparaturnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang profesional	Meningkatnya aparaturnya yang mempunyai kedisiplinan yang optimal	Kehadiran pegawai	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin berpakaian Dinas Prosentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai	100%	100%	23.000	100%	27.500	100%	30.000	100%	80.500
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	46 Stel	46 Stel	23.000	55 Stel	27.500	60 Stel	30.000	161 Stel	80.500
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparaturnya yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	1 Tahun	1 Tahun	270.000	1 Tahun	450.000	1 Tahun	500.000	1 Tahun	1.220.000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparaturnya dan jaringan yang mengikuti diklat	9 Keg.	9 Keg.	270.000	10 Keg.	300.000	10 Keg.	350.000	10 Keg.	920.000

			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan kinerja & kesejahteraan pengelolaan Administrasi kepegawaian SKPD	12 Bulan			12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	12 bulan	300.000
--	--	--	--------------------------------------	---	----------	--	--	----------	---------	----------	---------	----------	---------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan penyediaan capaian laporan kinerja dan keuangan yang akurat	Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	Kelengkapan laporan keuangan SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter	100%	100%	579.600	100%	810.000	100%	1.200.000	100%	2.589.600
				Prosentase Capaian Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja									
			Penyusunan RKA - SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA-SKPD Tahunan	2 Keg.	2 Keg.	30.000	2 Keg.	30.000	2 Keg.	50.000	2 Keg.	110.000
			Penyusunan DPA - SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan DPA-SKPD Tahunan	2 Kegiatan	2 Keg.	15.000	2 Keg.	15.000	2 Keg.	20.000	2 Keg.	50.000
			Penyusunan RENJA	Tersedianya dokumen RENJA	2 Keg.	2 Keg.	50.000	2 Keg.	50.000	2 Keg.	50.000	2 Keg.	150.000
			Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dok.	1 Dok.	50.000	1 Dok.	50.000	1 Dok.	50.000	1 Dok.	150.000
			Penyusunan TAPKIN SKPD	Tersedianya dokumen penetapan kinerja	1 Dok	1 Dok	15.000	1 Dok	15.000	1 Dok	25.000	1 Dok	55.000

			Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Dokumen RENSTRA	1 Dok	1 Dok	50.000			1 Dok	75.000	1 Dok	125.00 0
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	--	--	-------	--------	-------	-------------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peny. Lap Keu Semesteran, Lap. Akhir Tahun dan Perhitungan Penyus. Asset	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	2 Keg.	2 Keg.	25.000	2 Keg.	25.000	2 Keg.	25.000	2 Keg.	75.000
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Peningkatan kinerja & kesejahteraan pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	149.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	499.000
			Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi	Meningkatnya kinerja pelayanan dan administrasi	4 Keg.	4 Keg.	195.600	4 Keg.	200.000	4 Keg.	250.000	4 Keg.	645.600
			Evaluasi Renja SKPD	Tersedianya Laporan Evaluasi Renja SKPD				1 Dok.	100.000	1 Dok.	170.000	1 Dok.	270.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Fisik SKPD setiap bulan				12 Bulan	100.000	12 Bulan	185.000	12 Bulan	285.000
			Fasilitasi Focal Point Pengarustamaan Gender (PUG) DPPA	Terfasilitasinya Focal Point PUG di DPPA				4 triw.	75.000	4 triw.	100.000	4 triw.	175.000

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelatihan Keterampilan Kelompok Perempuan	Jumlah Kelompok Perempuan Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan	500 Orang	500 Orang	501.818	500 Orang	500.000	500 Orang	600.000	1500 Orang	1.601.818
			Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha	Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	3 Klp	3 Klp	167.058	3 Klp	170.000	3 Klp	190.000	9 Klp	527.058
			Pelatihan Tata Rias Wajah Bagi Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Keterampilan	200 Orang	200 Orang	203.503	200 Orang	200.000	200 Orang	220.000	600 Orang	623.503
			Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga bagi PKRT	Jumlah PKRT yang mendapatkan Pelatihan	200 Orang	200 Orang	204.858	200 Orang	200.000	200 Orang	200.000	200 Orang	604.858
			Peningkatan SDM Perempuan Pesisir dan Pulau	Jumlah SDM PKRT Pesisir dan Pulau	300 Orang	300 Orang	252.184	300 Orang	250.000	300 Orang	300.000	900 Orang	802.184
			Lokakarya Manajemen Kelompok Majelis Taklim	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	300 Orang	300 Orang	242.769	300 Orang	250.000	300 Orang	300.000	900 Orang	792.769

			Operasional Pokjanal Posyandu	Jumlah Posyandu Binaan yang dilatih	46 Posyandu	46 Posyandu	158.073	46 Posyandu	150.000	55 Posyandu	200.000	55 Posyandu	508.073
--	--	--	-------------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Peran dan Kualitas Bagi Ibu Rumah Tangga	450 Orang	450 Orang	386.000	300 Orang	390.000	450 Orang	500.000	1350 Orang	1.276.000
		2	Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Pembinaan Kelurahan Terpadu	Jumlah anggota Kelompok Perempuan yang dibina dalam pembinaan kelurahan terpadu	50 Orang	50 Orang	206.435	50 Orang	210.000	50 Orang	250.000	150 Orang	666.435
			Pembinaan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Rumah Tangga Prasejahtera yang mengikuti Pembinaan dalam Kegiatan P2WKSS	100 RT	100 RT	553.216	100 RT	-	-	-	100 RT	553.216
		1	Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Jumlah Rumah Tangga Prasejahtera yang mengikuti Pembinaan dalam Kegiatan P2K3	-	-	-	100 RT	450.000	100 RT	500.000	200 RT	950.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Pelatihan Keterampilan Kelompok Perempuan	Jumlah Kelompok Perempuan Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan	500 Orang	500 Orang	501.818	600 orang	500.000	600 orang	600.000	1700 orang	1.601.818
		1	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha	Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	3 Klp	3 Klp	167.058	400 orang	170.000	400 orang	190.000	9 Klp	527.058
		1	Pelatihan Tata Rias Wajah Bagi Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Keterampilan	200 Orang	200 Orang	203.503	200 Orang	200.000	200 Orang	220.000	600 Orang	623.503
		1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga bagi PKRT	Jumlah PKRT yang mendapatkan Pelatihan	200 Orang	200 Orang	204.858	200 Orang	200.000	200 Orang	200.000	200 Orang	604.858
		1	Peningkatan SDM Perempuan Pesisir dan Pulau	Jumlah SDM PKRT Pesisir dan Pulau	300 Orang	300 Orang	252.184	600 Orang	250.000	300 Orang	300.000	1200 Orang	802.184
		1	Lokakarya Manajemen Kelompok Majelis Taklim	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	300 Orang	300 Orang	242.769	300 Orang	250.000	300 Orang	300.000	900 Orang	792.769
		1	Operasional Pokjanel Posyandu	Jumlah Posyandu Binaan yang dilatih	46 Posyandu	46 Posyandu	158.073	46 Posyandu	150.000	55 Posyandu	200.000	55 Posyandu	508.073

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengarusutamaan Gender (PUG) terintergrasi dalam perencanaan penganggaran OPD	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan	Jumlah dan prosentase Perangkat Daerah yang perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)	29 SKPD	29 SKPD	827.715	40 SKPD	960.000	50 SKPD	1.145.000	50 SKPD	2.932.715
			Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	300 Orang	300 Orang	227.080	300 Orang	225.000	300 Orang	250.000	900 Orang	702.080
			Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan penganggaran Responsif Gender	400 Orang	400 Orang	312.803	400 orang	300.000	400 orang	400.000	1200 orang	1.012.803
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah Peserta koordinasi penguatan kelembagaan PUG	160 Orang	160 Orang	287.832	300 Orang	285.000	300 Orang	320.000	780 Orang	892.832
			Fasilitasi Coaching Corner Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Terfasilitasinya Coaching Corner Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)				120 Orang	150.000	200 Orang	175.000	320 Orang	325.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Perempuan berperan aktif dalam pengambilan keputusan	Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	73,95	73,95	6.177.910	93,58	6.205.000	93,96	6.480.000	93,96	18.862.910
			Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	2000 Orang	2000 Orang	1.166.419	1400 Orang	1.150.000	1000 Orang	1.250.000	4400 orang	3.566.419
			Pembinaan TP-PKK Kota Makassar	Terlaksananya Pembinaan 10 Program Pokok PKK	15 Kec.	15 Kec.	3.560.787	15 Kec.	3.600.000	15 Kec.	3.600.000	15 Kec	10.760.787
			Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta pelatihan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	200 Orang	200 Orang	179.842	500 Orang	180.000	200 Orang	200.000	900 Org	559.842
			Penyuluhan Pemahaman tentang Makassar'ta Tidak Rantasa bagi Ibu Rumah Tangga	Jumlah Ibu Rumah Tangga Yang Diberikan Penyuluhan tentang MTR			-	200 org	225.000	200 org	225.000	400 org	450.000
			Workshop Lorong Berspektif Gender	Jumlah Peserta Workshop Lorong Berspektif Gender	500 Orang	500 Orang	509.339	500 Orang	300.000	300 Orang	325.000	1300 orang	1.134.339
			Workshop Perempuan Penggerak Lorong	Jumlah peserta Workshop Perempuan Penggerak Lorong	300 Orang	300 Orang	252.184	600 Orang	250.000	300 Orang	300.000	1200 orang	802.184

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Workshop Pembuatan Souvenir Perkawinan Khas Kota Makassar	Jumlah Peserta Workshop pembuatan souvenir perkawinan khas	500 Orang	500 Orang	509.339	300 Orang	300.000	300 Orang	350.000	1100 orang	1.159.339
			Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan	Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop				200 org	200.000	200 org	230.000	400 org	430.000
Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi .	Jumlah dan Prosentase layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dan Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani	240 Kasus	240 Kasus	3.449.886	440 Kasus	3.445.000	640 Kasus	3.710.000	640 Kasus	10.604.886
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terfasilitasinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	12 Bulan	12 Bulan	572.494	12 Bulan	800.000	12 Bulan	850.000	12 Bulan	2.222.494
			Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking	Terfasilitasinya gugus tugas trafficking	3 Keg.	3 Keg.	174.977	3 Keg.	170.000	3 Keg.	200.000	9 Keg.	544.977
			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Jumlah penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80 Kasus	160 Kasus	307.715	200 Kasus	300.000	200 Kasus	400.000	640 Kasus	1.007.715
			Penyusunan RAD Trafficking (PTPPO)	RAD	-	-	-	1 Dok	150.000	-	-	1 Dok	150.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan dan pengelolaan shelter (rumah aman)	tersedianya rumah aman (shelter) bagi korban	1 Unit	1 Unit	190.848	1 Unit	200.000	1 Unit	220.000	1 Unit	610.848
			Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pelayanan Pendamping	400 Orang	400 Orang	333.681	400 Orang	300.000	400 Orang	400.000	400 Orang	1.033.681
			Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan	Tersosialisasinya P2TP2A di Kecamatan	750 Orang	750 Orang	500.000	600 Orang	300.000	750 Orang	500.000	2100 Orang	1.400.000
			Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan & HIV Aids	Jumlah peserta FGD Kekerasan dan HIV Aids	5 Keg.	5 Keg.	430.950	300 orang	100.000			5 Keg.	430.950
			Bina Keluarga Lansia	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Keluarga Bina Lansia	100 Orang	100 Orang	79.188	100 Orang	100.000			100 Klg. Lansia	79.188
			Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Penyandang Disabilitas bagi Anak Korban Kekerasan	Penyandang Disabilitas bagi Anak Korban Kekerasan mengetahui hak dan perlindungannya	200 Orang	200 Orang	140.118	200 org	100.000	100 Orang	150.000	500 org	390.118
			Pelatihan Pengelolaan Shelter Warga	Jumlah peserta yang mengetahui tentang Pengelolaan Shelter Warga	300 Orang	300 Orang	165.675	400 Orang	175.000	300 Orang	185.000	900 Orang	525.675
			Sosialisasi Shelter Warga	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Shelter Warga	500 Orang	500 Orang	251.290	400 Orang	200.000	400 Orang	200.000	1300 Orang	651.290

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Shelter Warga	Jumlah Shelter Warga yang difasilitasi	6 Kel.	6 Kel.	302.950	8 Kel.	250.000	12 Kel.	355.000	26 Kel.	907.950
			Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak			-	1 Dok	100.000			1 Dok	200.000
			Workshop Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Dini	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Kekerasan dan Perkawinan Dini				300 orang	200.000	300 orang	250.000	600 Orang	450.000
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak diberbagai bidang	Terpenuhinya Indikator Kota Layak Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pangurusutamaan Anak	Prosentase Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	8 Kel.	8 Kel.	2.529.684	75%	3.085.000	85%	3.535.000	85%	9.149.684
			Penguatan dan pengembangan forum anak	Jumlah anggota Forum Anak yang difasilitasi	300 Orang	300 Orang	241.838	300 Orang	250.000	300 Orang	250.000	900 Orang	741.838
			Festival Forum Anak Makassar	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam Festival Forum	450 Orang	450 Orang	334.383	300 Orang	300.000	450 Orang	360.000	1350 Orang	994.383
			Sosialisasi Kota Layak anak	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Kota Layak anak	840 Orang	840 Orang	493.398	500 Orang	260.000	720 Orang	270.000	2160 Orang	1.023.398
			Pembinaan Kelembagaan Anak	Jumlah Lembaga Anak yang di bina	5 Lembaga	5 Lembaga	218.804	16 Lembaga	200.000	25 Lembaga	230.000	5 Lembaga	648.804
			Pembinaan karakter dan kepribadian anak	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	450 Orang	450 Orang	247.234	300 Orang	250.000	300 Orang	270.000	1050 orang	767.234

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Sosialisasi Pemenuhan hak-hak anak	Jumlah anak & pendamping yang mengikuti sosialisasi				100 Orang	100.000	100 Orang	150.000	200 Orang	250.000	
			Pembinaan anak-anak prasejahtera	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	750 Orang	750 Orang	463.334	300 Orang	300.000	500 Orang	350.000	1750 Orang	1.113.334	
			Pemanfaatan taman tematik yang layak untuk anak	Jumlah Taman Tematik yang dimanfaatkan oleh Anak	4 Kel.	4 Kel.	231.863	1 Taman	200.000	1 Taman	230.000		661.863	
			Fasilitasi Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelurahan menuju Layak Anak				-	11	250.000	14	350.000	25	600.000
			Fasilitasi Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Pemberdayaan anak terpadu berbasis masyarakat				-	14 Kel	100.000	14 Kel.	130.000	30 Kel	230.000
			Layanan Integtarif Anak	Terbangunnya koordinasi layanan integratif anak				4 Keg.	150.000	4 Keg.	270.000	8 Keg.	420.000	
			Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak				-	200 org	125.000	100 org	150.000	200 org	275.000
			Pelatihan layanan komprehsip bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah	Jumlah petugas sekolah mengikuti pelatihan layanan komprehsip bagi anak berkebutuhan khusus				100 org	200.000	100 org	225.000	250 org	425.000	

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah gugus tugas Kota Layak Anak yang dikembangkan	1 Dok	1 Dok	298.830	10 Kel.	200.000	15 Kel.	300.000	9 Kec.	798.830
			Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Kota Layak Anak	Jumlah Kebijakan Kota Layak Anak			-	1 Dok	200.000			1 Dok	200.000
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak	Meningkatnya peran perangkat daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Program Sistem Data Gender dan Anak	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak			2.490.170	40 %	2.375.000	60 %	3.175.000	60 %	8.040.170
			Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah Gender dan Anak	1 Dok	1 Dok	315.160	1 Dok	300.000	1 Dok	300.000	3 Dok	915.160
			Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Hasil monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Makassar	4 Dok.	4 Dok.	311.662	4 Dok	250.000	1 Dok	300.000	6 Dok	861.662
			Sistem Informasi & Manajemen (SIM) PPPA	Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen(SIM) PPPA				1 SIM PPPA	50.000			1 SIM PPPA	50.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyusunan KIE Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak	Jumlah Paket KIE				1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	2 Paket	200.000
			Penataan dan Pendataan Arsip Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terkelolanya arsip Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 Dok	12 Dok	316.100	12 Bulan	250.000	12 Bulan	250.000	12 Bulan	816.100
			Pembuatan Panduan Pelayanan Publik Responsive Gender/Pro Anak	Adanya Panduan Pelayanan Publik Responsive Gender dan Pro Anak	1 Dok	1 Dok	249.727	-	-	1 Dok	250.000	1 Dok	499.727
			Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu	Jumlah Peserta Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu	200 Orang	200 Orang	200.000	200 orang	200.000	200 orang	250.000	600 orang	650.000
			Pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	400 Orang	400 Orang	300.512	400 orang	250.000	400 orang	300.000	1200 orang	850.512
			Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Anak	300 Orang	300 Orang	245.473	300 orang	250.000	300 orang	300.000	900 orang	795.473

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Perempuan	300 Orang	300 Orang	251.536	300 orang	250.000	300 orang	300.000	850 orang	801.536
			Penguatan Forum Data	Meningkatnya Kapasitas Forum Data	52 SKPD		-	51 SKPD	100.000	51 SKPD	150.000	52 SKPD	250.000
			Sosialisasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak	400 Orang	400 Orang	300.000			400 Orang	300.000	800 orang	600.000
			Evaluasi Kota Layak Anak	Adanya hasil Evaluasi Kota Layak Anak				2 Dok.	125.000	4 Dok.	125.000	8 Dok.	250.000
			Evaluasi Gugus Tugas Trafficking	Tersedianya hasil evaluasi tugas trafficking				2 Dok.	125.000	4 Dok.	125.000	8 Dok.	250.000
			Indeks Kepuasan Publik terhadap Pemberdayaan perempuan dan Anak	Tersedianya Indeks kepuasan Publik				4 Dok.	125.000	4 Dok.	125.000	8 Dok.	250.000
JUMLAH							22.110.607		23.082.000		26.535.400		71.728.007

Lampiran 4 RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Bab VI)

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi terutama di sektor pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan di dalam visi dan misi yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Perencanaan strategik disamping mengagendakan aktivitas pembangunan, harus pula dapat melingkupi program-program yang mendukung dan menjamin layanan masyarakat dapat dilakukan secara baik dan terarah, yang diantaranya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang tak pelak lagi merupakan suatu keharusan bagi manajemen Pemerintahan di era abad 21 saat ini.

Oleh karena itu strategi dalam kerangka perencanaan menengah pembangunan daerah (*Mid-term planning*) merupakan upaya yang cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pertimbangan dan analisis terhadap aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Secara umum penjabaran strategi dari tiap misi dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Strategi RPJMD Kota Makassar

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
Visi: Makassar Kota Dunia Yang Nyaman untuk Semua			
Misi 1: Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia			
Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat			
1	Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan	Angka Rata-Rata lama Sekolah	Pemerataan sarana/tenaga pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan
2	Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh	% kelulusan ujian	Peningkatan kualitas proses pembelajaran dan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
	jenjang pendidikan		manajemen berbasis sekolah
3	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Angka melek huruf	Pelibatan multipihak dalam penuntasan buta huruf dan gerakan gemar membaca
Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat			
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (modernisasi posyandu, gratis pelayanan puskesmas/pustu, gratis pelayanan RS, penanganan 1.000 hari pertama kehidupan)
5	Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Cakupan penemuan dan penanganan penderita/kejadian luar biasa (KLB)	Pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB
6	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (% Pertumbuhan Penduduk)	Penyadaran KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi
7	Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat	Cakupan kelurahan yang menerapkan PHBS	Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan
Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat			
8	Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Angka pengangguran (%)	Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha
9	Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna	Cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin	Kordinasi pelaksanaan dan penajam target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan
10	Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing	% tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar
11	Berkembangnya K-UMKM dan ekonomi kreatif	Nilai omzet K-UMKM	Peningkatan kapasitas teknis-manjerial dan sumberdaya keuangan pelaku K-UMKM
12	Meningkatnya produksi	Volume dan nilai	Peningkatan kapasitas

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
	perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan	produksi perikanan (ton dan Rp)	teknologi dan manajemen penangkapan serta perlindungan/pengawasan kawasan perairan
13	Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar	Volume dan nilai produksi vertikal garden (kebun kota) (ton dan Rp) di lorong	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebun kota berbasis vertical garden di lorong dan roof garden pada perumahan
14	Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa	Angka kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa, hotel dan restoran	Optimalisasi layanan perdagangan dan jasa unggulan berbasis jaringan dan standar Kota Asean
15	Berkembangnya pusat industri pengolahan strategis	Angka kontribusi PDRB sektor industri	Pengembangan kluster industri pengolahan berbasis potensi lokal
16	Meningkatnya daya saing pariwisata	Angka kunjungan wisata	Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata baru
Tujuan 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan relegius			
17	Meningkatnya kualitas kehidupan pemuda dan olahraga	% organisasi pemuda dan cabang olahraga yg berpretasi nasional/internasional	Sinergi pemangku kepentingan dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga
18	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Penyadaran dan kordinasi pemangku kepentingan dalam keamanan pangan
19	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
20	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial	% PMKS yang ditangani	Pengembangan sinergi multipihak dalam penanganan PMKS
21	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama	Jumlah insiden dan kasus konflik antar umat beragama	Penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antartokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial
22	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai budaya	Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yg dilestarikan (%)	Revitalisasi keragaman dan kekayaan budaya dalam tatanan kehidupan kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
Tujuan 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai			
23	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan (%)	Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat
24	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan korban bencana dan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran dan bencana lainnya	Penguatan sinergi pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan kebakaran dan bencana lainnya
Misi 2: Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berstandar Dunia			
Tujuan 6 : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia			
25	Berkembangnya transportasi publik dan pemenuhan infrastruktur perhubungan lainnya	% penumpang yang menggunakan transportasi publik "standar dunia" (%)	Pengembangan moda transportasi publik berbasis kerjasama daerah dan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha
26	Meningkatnya keterpenuhan dan kualitas sistem drainase dan penanganan banjir	Rata-rata jumlah, tinggi dan lama titik genangan yang terjadi	Pengembangan sistem drainase berbasis jaringan terpadu
27	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah	Porsipanjangjalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
28	Meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota	Cakupan panjang jaringan utilitas (listrik, telpon, air minum) yang terintegrasi dalam <i>boxculvert</i>	Pengembangan unit terintegrasi jaringan utilitas kota
29	Berkembangnya fungsi ekonomi, ekologi, sosial dan estetika pada pinggiran kanal	Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggiran kanal yang mencapai peningkatan fungsi ekonomi/ wisata, ekologi, sosial dan estetika	Penataan komprehensif pinggiran kanal dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha
Tujuan 7 : Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota			
30	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik dan privat	% Luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik (%)	Pengembangan taman tematik berbasis sebaran kecamatan bersama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
31	Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan	Volume dan % sampah yg ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan, dan reduksi.	perluasan RTH publik dan privat Penanaman budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah
32	Berkurangnya pencemaran tanah, air, udara dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan	Status mutu air, tanah dan udara	Peningkatan efektivitas pengendalian mutu air, tanah dan udara serta kepatuhan terhadap rekomendasi Amdal
33	Terwujudnya water-front city dan tata kelola lingkungan pesisir/pulau-pulau	Luas water front city yang terkelola	Kolaborasi multipihak dalam pengembangn water front city berbasis keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial
Tujuan 8 : Mewujudkan pemukiman sehat bagi masyarakat			
34	Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat	% rumah layak huni (rumah beton/ <i>knock down</i> layak huni)	Aplikasi teknologi perumahan ramah lingkungan dan layak huni bagi masyarakat dengan prioritas rumah tangga miskin
35	Meningkatnya akses air bersih masyarakat	Cakupan layanan air bersih (%)	Perluasan jangkauan pelayanan air bersih
36	Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman	Cakupan luas lahan pemakaman yang tertata secara jenazah bersusun (%)	Pengembangan lahan pemakaman dengan sistem jenazah bersusun
Tujuan 9 : Meningkatkan pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten			
37	Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan & penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah	Penyadaran dan penegakan regulasi RTRW
38	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	% penyelesaian sengketa tanah negara	Peningkatan sinergi multipihak dalam penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat khususnya sengketa tanah negara
Misi 3: Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar Dunia Bebas Korupsi			
Tujuan 10 : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
39	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik	% SKPD dengan status laporan kinerja baik	Peningkatan kapasitas administrasi pelaporan kinerja pada SKPD
40	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	% kecamatan dan kelurahan yang meningkat kapasitasnya	Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan serta pengurus RT/RW.
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baku	Modernisasi sistem kearsipan SKPD
42	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	% SDM aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya	Perbaikan sistem penempatan SDM aparatur
43	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Cakupan rekomendasi LHP yang diselesaikan rekomendasi tindak lanjutnya dengan baik	Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan
Tujuan 11 : Peningkatan kinerja pelayanan publik			
44	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	Penguatan pelayanan STSP dan penghantaran layanan ke rumah
45	Berkembangnya pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah	Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp dan \$)	Penyiapan sarana/prasarana investasi
46	Meningkatnya kualitas Pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta pengendalian kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	Peningkatan efektivitas pencatatan kependudukan
47	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Cakupan ruang publik yang mendapatkan layanan wifi gratis (%)	Pengembangan sinergi pemerintah dengan swasta dalam perwujudan warga kota yang smart
48	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD) sesuai dasar penetapan, kalender perencanaan, dan kelengkapan isi.	Peningkatan kualitas dokumen dan proses/mechanisme perencanaan serta pelibatan stakeholder
Tujuan 12 : Meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan	Peningkatan tertib administrasi keuangan dan pengelolaan asset berbasis manajemen kinerja
50	Berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah	Pertumbuhan PAD	Optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan penajaman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya dari tahun ke tahun. Arah kebijakan RPJMD Kota Makassar 2014-2109 adalah sebagai berikut.

6.2.1. Arah Kebijakan berdasarkan Strategi

Tabel 6.2
Arah Kebijakan berdasarkan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Makassar Kota Dunia Yang Nyaman untuk Semua				
Misi 1: Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia				
Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat				
1	Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan	Angka Rata-Rata lama Sekolah	Pemerataan sarana/tenaga pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan	Pendistribusian sumberdaya secara merata pada setiap wilayah (terutama pulau) dan pengalokasian dana sosial masyarakat untuk kebutuhan deposito pendidikan
2	Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	% kelulusan ujian	Peningkatan kualitas proses pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah	Penilaian kualitas guru bersertifikat dan penilaian/sertifikasi terhadap sekolah yang menerapkan manajemen mutu/modern
3	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Angka melek huruf	Pelibatan multipihak dalam penuntasan buta huruf dan gerakan gemar membaca	Pendidikan keaksaraan fungsional dan gerakan masyarakat gemar membaca
Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat				

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (modernisasi posyandu, gratis pelayanan puskesmas/pustu, gratis pelayanan RS, penanganan 1.000 hari pertama kehidupan)	Perbaikan layanan kesehatan ibu dan dan penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran
5	Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Cakupan penemuan dan penanganan penderita/ kejadian luar biasa (KLB)	Pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB	Pengendalian penyebaran penyakit menular serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa
6	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (% Pertumbuhan Penduduk)	Penyadaran KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi	Peningkatan pembinaan, keikutsertaan dan kemandirian ber-KB
7	Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat	Cakupan kelurahan yang menerapkan PHBS	Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat
Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat				
8	Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Angka pengangguran (%)	Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha	Peningkatan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja
9	Terwujudnya jaminan sosial keluarga miskin serba guna	Cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin	Kordinasi pelaksanaan dan penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi TKPKD dalam penanganan kemiskinan serta jaminan sosial serba guna Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin (PKRTM)
10	Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing	% tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
11	Berkembangnya K-UMKM dan	Nilai omzet K-UMKM	Peningkatan kapasitas teknis-manjerial dan	Fasilitasi penciptaan kesempatan pelaku UNKM mendapatkan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
12	ekonomi kreatif Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan	Volume dan nilai produksi perikanan (ton dan Rp)	sumberdaya keuangan pelaku K-UMKM Peningkatan kapasitas teknologi dan manajemen penangkapan serta perlindungan/pengawasan kawasan perairan	jaringan pemasaran pengembangan usaha pelaku ekonomi kreatif Pengembangan teknologi penangkapan dan pengawasan perairan multipihak
13	Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar	Volume dan nilai produksi vertikal garden (kebun kota) (ton dan Rp) di lorong	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebun kota berbasis vertical garden di lorong dan roof garden pada perumahan	Pengembangan kapasitas masyarakat lorong dalam inovasi vertical garden
14	Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa	Angka kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa, hotel dan restoran	Optimalisasi layanan perdagangan dan jasa unggulan berbasis jaringan dan standar Kota Asean	Kerjasama antar sektor dalam peningkatan daya saing perdagangan dan jasa
15	Berkembangnya pusat industri pengolahan strategis	Angka kontribusi PDRB sektor industri	Pengembangan klaster industri pengolahan berbasis potensi lokal	Pengembangan klaster/pusat-pusat industri pengolahan
16	Meningkatnya daya saing pariwisata	Angka kunjungan wisata	Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata baru	Pengembangan wisata kuliner pada pinggir kanal
Tujuan 4: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan religius				
17	Meningkatnya kualitas kehidupan pemuda dan olah raga	% organisasi pemuda dan cabang olah raga yg berpretasi nasional/internasional	Sinergi pemangku kepentingan dalam pembinaan prestasi pemuda dan olahraga	Optimalisasi peran stakeholder dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga
18	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Penyadaran dan kordinasi pemangku kepentingan dalam keamanan pangan	Penanganan keamanan pangan
19	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Peningkatan peran perempuan pada ranah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta perlindungan anak
20	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial	% PMKS yang ditangani	Pengembangan sinergi multipihak dalam penanganan PMKS	Optimalisasi peran multipihak terhadap penanganan anak jalanan dan PMKS

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
21	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama	Jumlah insiden dan kasus konflik antar umat beragama	Penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial	lainnya Pembinaan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan
22	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai budaya	Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yg dilestarikan (%)	Revitalisasi keragaman dan kekayaan budaya dalam tatanan kehidupan kota	Identifikasi dan pembinaan terhadap keragaman dan kekayaan budaya
Tujuan 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai				
23	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan yang diselesaikan (%)	Penguatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat	Pemantauan dan penanganan gangguan K4 serta penegakan peraturan kota